



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation

Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang

Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142

Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDEDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

Vidya Utami Eryadi ¹⁾

Dr. Ilham Wahyudi, SE, M.Si ²⁾

Salman Jumaili, SE, Ak, M.Si ³⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, email: utamividyaeryadi@gmail.com

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, email: ilham_wahyudi@unja.ac.id

³⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, email: salman.jumaili@unja.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the influence of institutional ownership, majority ownership, government ownership, and profitability on sustainability reporting assurance. This study uses a sample of mining companies listed on the IDX (Indonesia Stock Exchange) 2017-2019. The sampling technique used was purposive sampling. The sample used in this study amounted to 36 companies, a total of 108 data. Logistic regression analysis techniques. The software used for data processing is SPSS 22 for windows. Sustainability Reporting Assurance is used as the dependent variable, while institutional ownership, majority ownership, government ownership, and profitability are used as independent variables. The results of the hypothesis test show that institutional ownership, majority ownership, government ownership, and profitability simultaneously affect Sustainability Reporting Assurance. Partially, government ownership has an effect on Sustainability Reporting Assurance, while institutional ownership, majority ownership, and profitability have no effect on Sustainability Reporting Assurance.

Keywords: Kepemilikan institusional, Kepemilikan Mayoritas, Kepemilikan Pemerintah, Profitabilitas, Assurance, sustainability reporting

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS,
KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP
SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE**

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (*financial*) saja. Akan tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi budaya dengan lingkungan sosialnya. (Chariri dan Charles, 2012).

Pelaporan CSR merupakan suatu alat komunikasi perusahaan yang digunakan untuk menyampaikan sebuah kesan transparan. Pelaporan CSR juga merupakan alat yang tersedia bagi manajer untuk menilai perbaikan terus-menerus dalam lingkup non-keuangan. Dalam pelaporan CSR, transparansi menjadi kondisi pokok yang seharusnya dipenuhi. Transparansi sendiri diartikan sebagai suatu konsep yang berkaitan secara umum dengan pelaporan, khususnya pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). (Hamudiana & Achmad, 2017).

CSR diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dimana pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Tanggung jawab social dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Perusahaan yang mengambil sumber daya alam seperti tambang juga memiliki ketetapan Undang-Undang yaitu di atur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 108 pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, penyusunan program tersebut dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas dengan membuat laporan CSR. Namun, masih terdapat pula masalah yang terjadi seperti adanya penyelewengan dana CSR di perusahaan pertambangan. Penyelewengan dana CSR pada kasus yang terjadi membutuhkan peranan audit untuk meningkatkan kredibilitas dan menambah nilai pada informasi. Peran audit tidak hanya terbatas pada laporan keuangan, namun perlu di aplikasikan pada informasi non keuangan. Penggunaan *assurance* dari pihak eksternal dapat meningkatkan keandalan dan kredibilitas dari *Sustainability Reporting*. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam penggunaan *assurance* pada *sustainability reporting*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *assurance* pada *sustainability reporting* yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan mayoritas, kepemilikan pemerintah, dan profitabilitas.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. investor institusional mendapatkan kekuatan pada pasar investasinya dan juga meningkatkan ketertarikan mereka pada investasi *sustainability*, SRA dapat menjadi alat yang penting bagi investor untuk mengakses reliabilitas laporan CSR, sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi pihak manajemen untuk meningkatkan kebutuhan akan penggunaan SRA (Angelstig dan Gustavsson, 2016).

Kepemilikan mayoritas pemegang saham yang memegang saham minimal 50% dari seluruh modal atau ekuitas perusahaan, yang menunjukkan adanya hak kendali. Melalui kepemilikan mayoritas dapat dilihat bahwa struktur kepemilikan yang lebih besar membutuhkan penyediaan jaminan dengan kualitas yang tinggi, konsentrasi dengan kepemilikan yang lebih tinggi pada perusahaan yang menerapkan *Sustainability Reporting Assurance* dari pada yang tidak menerapkan, dengan demikian kepemilikan mayoritas yang besar cenderung akan membuat *Sustainability Reporting* (De Beelde dan Tuybens, 2015).

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan atau aspirasi pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dapat membuat keputusan yang bisa diikuti oleh semua pihak, ketika pemerintah memiliki pandangan jauh kedepan tentang pentingnya *assurance* atas *sustainability reporting* untuk mengurangi dampak asimetri informasi maka kepemilikan pemerintah didalam suatu perusahaan dapat mendorong adanya *sustainability reporting assurance*.

Profitabilitas merupakan faktor penentu yang signifikan pelaporan keberlanjutan karena perusahaan yang profitabel (menguntungkan) cenderung menungkapkan informasi keberlanjutan dalam rangka melegitimasi aktivitasnya, kinerja ekonomi perusahaan mungkin tidak akan sustainable jika kepentingan publik untuk isu-isu keberlanjutan diabaikan. Manajemen perusahaan yang profitabel ingin mengungkapkan lebih banyak informasi kepada publik dalam rangka untuk mempromosikan kesan positif (Riwayadi, 2019).

Penelitian ini merujuk pada penelitian Angelstig dan Gustavsson (2016) yang meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap jaminan pelaporan keberlanjutan, pada penelitian ini struktur kepemilikan hanya menggunakan Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Mayoritas. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dirujuk. Pertama, penelitian sebelumnya berfokus pada perusahaan yang terdaftar di NASDAQ Stockholm (small, mid, and large cap) pada akhir tahun 2013, sedangkan penelitian ini berfokus pada perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. Alasan Pemilihan perusahaan tambang sebagai objek penelitian, karena adanya fenomena penyelewengan dana CSR yang dilakukan oleh perusahaan tambang dan perusahaan tambang banyak mendapat sorotan masyarakat karena memiliki dampak resiko yang tinggi terhadap alam yang ada di sekitar perusahaan.

Kedua, penelitian Angelstig dan Gustavsson (2016) meneliti struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan institusional dan kepemilikan

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

mayoritas, sedangkan penelitian ini meneliti struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan mayoritas, kepemilikan pemerintah, dan profitabilitas.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris apakah Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Mayoritas, Kepemilikan Pemerintah Dan Profitabilitas berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting Assurance* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan keandalan laporan seperti *sustainability reporting*.

KAJIAN TEORI

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Teori legitimasi menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Oleh karena itu, CSR merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela (Lako, 2011).

Teori Stakeholder

Lako (2011) menjelaskan bahwa teori *Stakeholder* ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan.. Perspektif ini berbicara tentang masyarakat dan lingkungan yang merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan. *Corporate Social Responsibility* menurut Lako (2011) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* atau pemangku kepentingan.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*)

Laporan keberlanjutan menurut peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, laporan keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Qadriatin dan Sulistyawati, (2018) menjelaskan bahwa *Sustainability Reporting* memiliki definisi yang beragam, *Sustainability Reporting (SR)* berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*).

Penjaminan Laporan keberlanjutan

Assurance pada laporan keberlanjutan merupakan suatu metode untuk meningkatkan kredibilitas dan keakuratan dari laporan terutama untuk mengambil

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

keputusan bagi *stakeholder*. Dibutuhkan pertimbangan dalam mengambil keputusan karena melakukan *assurance* bukan suatu keputusan yang tanpa biaya. Terutama dengan sifat *assurance* yang dilakukan secara sukarela. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa determinan yang mungkin menjadi pendorong untuk menggunakan *assurance* pada laporan keberlanjutan. Laporan berkelanjutan yang disusun oleh perusahaan harus berdasarkan standar GRI yang telah ditetapkan, laporan berkelanjutan di perusahaan juga perlu dilakukan audit yang mengaudit nya ialah pihak eksternal yang independen. (Zulaikha dan Indiyanti, 2017).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela, Investor institusional memiliki *power dan experience* untuk bertanggung jawab untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Hal ini berarti, dengan kepemilikan institusional yang besar dapat mendorong jaminan dari *Sustainability Report* yang dilakukan oleh perusahaan (Barung, 2018).

Kepemilikan Mayoritas

Kepemilikan mayoritas merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh publik dan pihak luar selain manajemen perusahaan (Luciana, 2008). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 65 menyatakan bahwa pengendalian dianggap ada apabila pihak pengendali memiliki lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan terkendali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan penuh atas perusahaan.

Kepemilikan Pemerintah

Perusahaan dimana struktur kepemilikan yang keberadaan sahamnya dimiliki oleh negara dapat diklasifikasikan sebagai kepemilikan negara atau pemerintah. Perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah pusat ataupun kota dikatakan bahwa secara signifikan memberikan pengaruh keputusan manajerial melalui pemegang saham dan kekuatan politik (Ardiyanto & Pratiwi, 2018).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham sebagai salah satu *stakeholder* semakin tinggi profit yang dihasilkan perusahaan maka semakin besar keuntungan yang diterima pemegang saham (Karlina, dkk, 2019).

Hipotesis Penelitian

H₁ : Kepemilikan institusional, kepemilikan mayoritas, dan kepemilikan pemerintah, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability*

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

- Reporting Assurance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019
- H₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability Reporting Assurance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019
- H₃ : Kepemilikan Mayoritas berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability Reporting Assurance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019
- H₄ : Kepemilikan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability Reporting Assurance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019
- H₅ : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability Reporting Assurance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek penelitian. Populasi penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2019. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 47 perusahaan. Dari data 47 perusahaan sampel yang memenuhi kriteria perusahaan pertambangan yang diambil menjadi sampel penelitian adalah 36 perusahaan. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, Metode analisis statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistic.

Variabel Independen (Bebas)

Kepemilikan Instiusional(X₁)

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, Institusi Luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun, (Istiantoro, dkk 2017).

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Mayoritas (X₂)

Kepemilikan mayoritas diartikan sebagai kepemilikan saham oleh pihak yang memiliki persentase yang besar terhadap perusahaan non publik atau public. Klasifikasi pemegang saham mayoritas didasarkan pada komposisi jumlah kepemilikan saham dan hak yang dimilikinya. (Ratu, 2018).

$$\text{Kepemilikan Mayoritas} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki mayoritas}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

Kepemilikan Pemerintah (X₃)

Kepemilikan pemerintah yaitu perusahaan yang kepemilikan atau saham perusahaannya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah. (Adiatma dan Suryanawa, 2018). Pengukuran kepemilikan pemerintah diukur dengan menggunakan variabel dummy, nilai 1 diberikan jika ada kepemilikan pemerintah di dalam struktur kepemilikan dan nilai 0 diberikan jika tidak ada kepemilikan pemerintah di dalam struktur kepemilikan (Adiatma dan Suryanawa, 2018).

Profitabilitas (X₄)

Profitabilitas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham sebagai salah satu stakeholder semakin tinggi profit yang dihasilkan perusahaan maka semakin besar keuntungan yang diterima pemegang saham (Karlina, dkk, 2019). Profitabilitas diukur dengan *return on asset* (ROA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Data Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
INST	108	0,00	0,97	0,5563	0,24250
MYR	108	0,10	0,93	0,5352	0,19810
ROA	108	-1,54	0,46	0,0395	0,18051
Valid N (listwise)	108				

Sumber: Output SPSS 22, 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam Tabel 4.1, dapat diketahui gambaran dari variabel dependen dan masing-masing variabel independen sebagai berikut:

a. Kepemilikan Institusional

Berdasarkan Tabel 4.1 statistik deskriptif diatas, diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang dimiliki oleh perusahaan PT. Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) pada tahun 2017. dan nilai maksimum sebesar 0,97 yang dimiliki oleh perusahaan PT. Citra Mineral Investindo Tbk (CITA) pada tahun 2017 sampai 2018. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,55 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,24250.

b. Kepemilikan Mayoritas

Berdasarkan Tabel 4.1 statistik deskriptif diatas, kepemilikan mayoritas diukur dengan kepemilikan saham oleh pihak yang memiliki persentase yang besar terhadap perusahaan non public atau publik memiliki nilai minimum sebesar 0,10 yang dimiliki oleh perusahaan PT. Bayan Resources Tbk

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

(BYAN). dan nilai maksimum sebesar 0,93 yang dimiliki oleh perusahaan PT. J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) . Nilai rata-rata kepemilikan mayoritas sebesar 0,53 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,19810.

c. Profitabilitas

Berdasarkan Tabel 4.1 statistik deskriptif diatas, diukur dengan menggunakan ROA memiliki nilai minimum sebesar -1,54 dimiliki oleh perusahaan PT. Mitra Investindo Tbk (MITI) pada tahun 2019 profit yang didapat pada perusahaan menurun secara signifikan dan nilai maksimum sebesar 0,46 dimiliki oleh perusahaan PT. Bayan Resources Tbk (BYAN) pada tahun 2018. Nilai rata-rata profitabilitas sebesar 0,0395 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,18051.

Variabel kepemilikan pemerintah (X3) dan SRA (Y) merupakan variabel dummy sehingga dianalisis menggunakan statistik frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Frekuensi

Variabel		Frekuensi	Persentase
SRA	1	17	15.7
	0	91	84.3
	Total	108	100
PMRTH	1	18	16.7
	0	90	83.3
	Total	108	100

Sumber: Data diolah, SPSS 22.0

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa variabel *Sustainability Reporting Assurance* diukur dengan variabel dummy. Nilai 1 diberikan jika laporan keberlanjutan dijamin oleh pihak eksternal yang independen berjumlah 17 atau 15,7%. Nilai 0 diberikan jika tidak ada *independent assurance* berjumlah 91 atau 84,3%. variabel kepemilikan pemerintah diukur dengan variabel dummy. Nilai 1 diberikan jika ada kepemilikan pemerintah di dalam struktur kepemilikan berjumlah 18 atau 16,7%. Nilai 0 diberikan jika tidak ada kepemilikan pemerintah di dalam struktur kepemilikan berjumlah 90 atau 83,3%.

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

Analisis Regresi Logistik
Menilai Kelayakan Model Regresi

Tabel 4.3
Block 0
Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	95,484	-1,370
	2	94,046	-1,650
	3	94,035	-1,677
	4	94,035	-1,678

Sumber: Data diolah, SPSS 22.0

Tabel 4.3 di atas menunjukkan model yang hanya memasukkan konstanta saja, yaitu sebesar 94,035 dan memiliki distribusi *chi square* (X^2) dengan df 107 (108 – 1), yaitu 124,3421. Nilai $-2\log L < X^2$ tabel, sehingga menerima H_0 , maka menunjukkan bahwa model sebelum memasukkan variabel independen adalah fit dengan data.

Tabel 4.4
Block 1
Iteration History^{a,b,a}

Iteration	-2log likelihood	Coefficients				
		Constant	INST	MYR	PMRTH	ROA
Step 1	85,937	-2,420	1,032	0,555	1,065	0,026
2	80,747	-3,807	2,112	1,030	1,550	-0,091
3	80,132	-4,526	2,836	1,195	1,756	-0,276
4	80,112	-4,672	3,021	1,184	1,800	-0,324
5	80,112	-4,678	3,030	1,181	1,802	-0,326
6	80,112	-4,678	3,030	1,181	1,802	-0,326

Sumber: Data diolah, SPSS 22.0

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa model dengan konstanta dan variabel independen dengan nilai $-2\log L$ sebesar 80,112 dan memiliki distribusi *chi square* (X^2) dengan df 107 (108 – 1), yaitu 124,3421. Nilai $-2\log L < X^2$ tabel, sehingga menerima H_0 , maka menunjukkan bahwa model setelah memasukkan variabel independen adalah fit dengan data.

Tabel 4.5
Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig
1	12.259	8	0,140

Sumber: Data diolah, SPSS 22.0

Tabel output SPSS 4.5 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai statistics *Hosmer and Lemeshow Goodness-of-fit* sebesar 12,259 dengan signifikansi 0,140 yang nilainya $> 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima.

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

Persamaan Regresi Logistik

Hasil uji statistik dengan menggunakan software SPSS versi 22.0 menghasilkan persamaan regresi logistik seperti yang disajikan pada tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6
Analisis Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	Df	Sig
Step 1	INST	3,030	1,879	2,601	1	0,107
	MYR	1,181	2,177	0,294	1	0,587
	PMRTH	1,802	0,631	8,162	1	0,004
	ROA	-0,326	1,688	0,037	1	0,847
	Constant	-4,678	1,315	12,658	1	0,000

Sumber: Data diolah, SPSS 22.0

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi logistik yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$SRA\left(\frac{SRA}{SRA-1}\right) = -4,678 + 3,030INST + 1,181MYR + 1,802PMRTH - 0,326ROA$$

Pengujian Hipotesis

Tabel 4.7
Omnibus Test

		Chi-Square	df	Sig
Step 1	Step	13,922	4	0,008
	Block	13,922	4	0,008
	Model	13,922	4	0,008

Sumber: Data diolah, SPSS 22.0

Tabel 4.8
Uji Wald

		B	S.E.	Wald	df	Sig
Step 1	INST	3,030	1,879	2,601	1	-0,107
	MYR	1,181	2,177	0,294	1	0,587
	PMRTH	1,802	0,631	8,162	1	0,004
	ROA	-0,326	1,688	0,037	1	0,847
	Constant	-4,678	1,315	12,658	1	0,000

Sumber: Data diolah, SPSS 22.0

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

Koefisien Determinasi

Tabel 4.10
Uji Determinasi

Step	-2 log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	80,112 ^a	0,121	0,208

Uji koefisien determinasi menggunakan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,208 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan mayoritas, kepemilikan pemerintah, dan profitabilitas dalam menjelaskan *sustainability reporting assurance* adalah sebesar 0,208 atau 20,8% termasuk dalam kategori lemah(0,201 – 0,40) dan terdapat 79,2% (100% - 20,8%)

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Mayoritas, Kepemilikan Pemerintah, dan Profitabilitas, terhadap *sustainability reporting assurance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan kepemilikan institusional, kepemilikan mayoritas, kepemilikan pemerintah, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting Assurance* diterima. Hal ini berarti bahwa variabel kepemilikan institusional (X_1), kepemilikan mayoritas (X_2), kepemilikan pemerintah(X_3), dan profitabilitas (X_4) berpengaruh secara simultan terhadap *Sustainability Reporting Assurance* (Y) sehingga H_1 dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelstig dan Gustavsson (2016) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting Assurance*, investor institusional mendapatkan kekuatan pada pasar investasinya dan juga meningkatkan ketertarikan mereka pada investasi *sustainability*. Damen (2016) menyatakan bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting Assurance*. Semakin tinggi tingkat kepemilikan mayoritas, maka perusahaan perlu menerapkan *Sustainability Reporting Assurance*. *Assurance* atas *Sustainability Reporting* dilakukan untuk memenuhi tekanan dari pihak pemegang saham mayoritas yang perhatian terhadap sosial dan lingkungan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *sustainability reporting assurance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability Reporting Assurance* sehingga H_2 dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Toruan dan Aditya (2020) dan Dewi dan Pitriasari (2019), Namun tidak sejalan dengan penelitian Angelstig dan Gustavsson (2016) yang

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *sustainability reporting assurance*.

Dewi dan Pitriasari (2019) yang menemukan bahwa para investor institusional hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi saja tanpa mempedulikan tanggung jawab perusahaan pada *stakeholder* lainnya. Kondisi ini mencerminkan kepemilikan institusional di Indonesia belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi sehingga para investor institusi ini cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Investor institusional jenis ini biasanya investasinya hanya bersifat jangka pendek karena investor institusional dengan perspektif jangka panjang cenderung mempertimbangkan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Mayoritas terhadap *sustainability reporting assurance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan mayoritas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability Reporting Assurance* sehingga H₃ dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Angelstig dan Gustavsson (2016) dan Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan mayoritas tidak memiliki pengaruh terhadap *Sustainability Reporting Assurance*, Peneliti Damen (2016) menemukan hasil yang berbeda bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting Assurance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan mayoritas dapat juga dimiliki oleh mayoritas perseorangan melalui kepemilikan perseorangan, perusahaan non publik atau keluarga. Perusahaan jenis ini biasanya akan memiliki keputusan-keputusan berdasarkan kepentingan kepemilikan mayoritas perseorangan atau keluarga. Arah kebijakannya pada umumnya yang akan menguntungkan mereka sebagai pemegang saham mayoritas. Penggunaan *assessment* atas *sustainability reporting* bagi kepemilikan mayoritas hanya akan menambah pengeluaran bagi perusahaan sehingga umumnya perusahaan dengan kepemilikan mayoritas perseorangan atau keluarga tidak akan tertarik untuk menggunakan jasa *assessment*. Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas perseorangan atau keluarga juga umumnya lebih kurang profesional di dalam manajemen perusahaan sehingga akan berdampak pada rendahnya tingkat *sustainability reporting*. Apabila digunakan *sustainability reporting assessment* akan mengungkapkan sisi negatif perusahaan. Kondisi inilah yang menyebabkan rendahnya minat kepemilikan mayoritas untuk menggunakan *sustainability reporting assurance*.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap *sustainability reporting assurance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability Reporting Assurance* sehingga H₄ dalam penelitian ini diterima.

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

Perusahaan go publik yang kegiatan operasinya berkaitan dengan alam diwajibkan untuk melakukan pelaporan keberlanjutan atau *sustainability reporting* oleh pemerintah, namun pemerintah tidak mengatur terkait konten/isi pelaporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan disusun menggunakan standar internasional yang diatur oleh *Global Reporting initiative* (GRI), laporan berkelanjutan di perusahaan juga perlu dilakukan audit yang mengauditnya ialah pihak eksternal yang independen, dalam pedoman G4, GRI menyarankan menggunakan *external assurance* untuk laporan keberlanjutan, tetapi tidak mengharuskan laporan yang sesuai dengan pedoman G4.

Berdasarkan data penelitian yang diteliti tujuh perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah hanya ada satu perusahaan yang melaporkan *sustainability reporting assurance*, sedangkan enam perusahaan yang dimiliki pemerintah lainnya tidak melakukan *sustainability reporting assurance*, Pemerintah sebagai lembaga yang memegang otoritas tertinggi perlu menetapkan kebijakan terkait *sustainability reporting*, terutama *sustainability reporting assurance*. pemerintah telah mengatur adanya CSR namun pemerintah tidak mengatur tentang seberapa jauh perusahaan mengungkapkan CSR, peran pemerintah disini yaitu perlu mendorong adanya *assurance* atas *sustainability reporting*.

Adiatma dan Suryanawa (2018) menjelaskan jumlah saham yang dimiliki pemerintah akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai penerapan laporan *sustainability report*. Melalui BAPEPAM-LK yang sekarang ini bernama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pemerintah mengeluarkan UU No 40 tahun 2007 P tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (1) yang isinya Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Kebijakan ini direspon positif oleh perusahaan pertambangan, perusahaan dapat mengambil langkah lebih jauh untuk menggunakan jasa *assurance* agar laporan keberlanjutan yang dikeluarkan perusahaan itu memiliki kredibilitas yang tinggi karena perusahaan menggunakan jasa *assurance* dari pihak ketiga yang independen, melalui laporan keberlanjutan ini perusahaan ingin menunjukkan keakuratan dan keseriusan bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan kelangusungan usaha dari sisi keuntungan (*profit*), tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat (*people*) dan bumi (*planet*) ketiga hal tersebut dikenal dengan *Tripple-P Bottom line*. (Saifudin dan Safitri, 2019).

Pengaruh Profitabilitas terhadap *sustainability reporting assurance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability Reporting Assurance* sehingga H_5 dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sofia dan Respati (2020), dan Burgwal dan Vieira (2014) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *sustainability reporting assurance*, namun tidak sejalan

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

dengan penelitian yang dilakukan Riwayadi (2019) profitabilitas berpengaruh terhadap *sustainability reporting assurance*.

Sofia dan Respati (2020) menjelaskan bahwa tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi *sustainability reporting* dikarenakan hukum dari pengungkapan laporan ini adalah wajib sehingga baik perusahaan dengan ROA tinggi maupun rendah, semuanya melakukan pengungkapan *sustainability reporting*. Tinggi rendahnya profitabilitas tidak berdampak pada pengungkapan *sustainability reporting* dikarenakan pengungkapan *sustainability reporting* hukumnya adalah wajib sehingga perusahaan dengan profitabilitas yang rendah pun juga menginformasikan *sustainability reporting*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kepemilikan institusional, kepemilikan mayoritas, kepemilikan pemerintah, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *sustainability reporting assurance*. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan mayoritas, kepemilikan pemerintah, dan profitabilitas secara simultan mampu meningkatkan probabilitas perusahaan menerapkan *sustainability reporting assurance*. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *sustainability reporting assurance*. Hasil penelitian menjelaskan kepemilikan institusional masih memandang yang wajib adalah melaporkan *sustainability reporting* sedangkan *sustainability reporting assurance* masih merupakan opsional sehingga kepemilikan institusional akan mengambil keputusan-keputusan yang tidak akan mengganggu keuangan perusahaan, maka sebagian besar perusahaan tidak melakukan *sustainability reporting assurance*.

Kepemilikan Mayoritas tidak berpengaruh signifikan terhadap *sustainability reporting assurance*. Artinya, kepemilikan mayoritas yang didominasi oleh Kepemilikan institusional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham termasuk kepemilikan institusional sendiri. Hal ini mengingat bahwa *assurance* atas *Sustainability Reporting* hanya menambah beban keuangan perusahaan dan bukan merupakan hal yang wajib di Indonesia, sehingga pelaksanaannya dapat ditunda. Hal yang penting adalah bahwa perusahaan telah menunaikan kewajiban atas pengungkapan *Sustainability Reporting* terlepas apakah laporan itu telah diaudit atau tidak. Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *sustainability reporting assurance*. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dapat membuat keputusan yang bisa diikuti oleh semua pihak, ketika pemerintah memiliki pandangan jauh kedepan tentang pentingnya *assurance* atas *sustainability reporting* untuk mengurangi dampak asimetri informasi maka kepemilikan pemerintah didalam suatu perusahaan dapat mendorong adanya *sustainability reporting assurance*. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *sustainability reporting assurance*. Perusahaan masih berfokus pada beban operasional lainnya Karena *assurance* atas *sustainability reporting* belum menjadi suatu keharusan. Besar kecilnya profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi *sustainability reporting* perusahaan dikarenakan laba yang dimiliki perusahaan diprioritaskan untuk kepentingan operasional, sehingga pemanfaatan untuk aktivitas social lebih kecil.

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS,
KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP
*SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE***

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini meneliti determinan *sustainability reporting assurance* yang terbatas pada variabel kepemilikan institusional, kepemilikan mayoritas, kepemilikan pemerintah, dan profitabilitas yang menghasilkan koefisien determinasi 20,8% yang termasuk kategori lemah. Variabel yang diduga juga dapat berpengaruh terhadap *sustainability reporting assurance* selain dari empat variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti *Leverage* (Rakhman, 2017), *Solvabilitas* (Riwayadi, 2019). Perusahaan diharapkan dapat terus meningkatkan keandalan laporan seperti *sustainability reporting*, karena dengan adanya *assurance* tentu ada jaminan bagi investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap *sustainability reporting*. *Assurance* dapat mengurangi asimetri informasi yang terkandung didalam laporan, sehingga memberikan keyakinan lebih kepada pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan.

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE

REFERENSI

- Adiatma, K. B., & Suryanawa, I. K. (2018). Pengaruh Tipe Industri, Kepemilikan Saham Pemerintah, Profitabilitas Terhadap Sustainability Report. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(2), 934-958.
- Angelstig, M., & Gustavsson, S. (2016). The Effect of Ownership Structure on the Sustainability Reporting Assurance Practice A Quantitative Study on Factors Influencing the Choice of Sustainability Reporting Assurance in a Swedish Setting.
- Anggraini;Reni;Retno,Fransisca;Ninik;Yudianti, dan Ni Putu;Rusmitha;Cintya Dewi. Kualitas Assurance Statement Atas Sustainability Reports (Studi Empiris di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.12 (No.2)* : Hal. 148-171 Th. 2019 ISSN: 1979-360X E- ISSN: 2598-6767
- Chariri, & Charles. (2012). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi kasus pada Bank Syariah di Asia).
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* 23. ,Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hamudiana, A., & Achmad, T. (2017). Pengaruh Tekanan Stakeholder Terhadap Transparansi Laporan Keberlanjutan Perusahaan-Perusahaan Di Indonesia. *Pengaruh Tekanan Stakeholder Terhadap Transparansi Laporan Keberlanjutan Perusahaan-Perusahaan Di Indonesia*, 6(4), 226–236.
- Istiantoro, Inosensius; Ardi, Paminto; Ramadhan, Hery. (2017) *Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI*. ISSN Online; 2520-1135159. Volume 14, No. 2 2017.
- Lako, Andreas. (2011). *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Semarang: Erlangga.
- Prabowo, Tri, Jatmiko, Wahyu, dan Purwati. (2019). *Perbedaan Nilai Asimetri Informasi Pada Assurance Dan Non Assurance Sustainability Report*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019, Halaman 1-12 [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting Issn](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting Issn) (Online): 2337-3806
- Qadriati, Aprilia; dan Sulistyawati, Ardiani; Ika (2018). *Pengungkapan Sustainability Report Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. *Majalah Ilmiah Solusi* Vol. 16, No. 4 Oktober 2018 ISSN : 1412-5331

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MAYORITAS,
KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN PROFITABILITAS TERHADAP
SUSTAINABILITY REPORTING ASSURANCE**

- Rakhman, Arif. (2017). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Keputusan Penerapan Assurance Laporan Keberlanjutan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan Dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2014)*. Vol. 2 No. 01 2017.
- Riwayadi. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independence Assurance Laporan Keberlanjutan*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas ISSN (Print): 2442-2363,
- Rudito, Bambang dan Famiola, Melia. (2013). *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Syarkili, Ihsan; Cheisviyanny, Charoline; Halmawati. (2019). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Reporting*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, NO 1, Seri C, Februari 2019, Hal 277-289. ISSN: 2656-3649
- Zulaikha,;Indyanti, Jeska, Almira. (2017). *Assurance Laporan Keberlanjutan: Determinan Dan Konsekuensinya Terhadap Nilai Perusahaan*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, Halaman 1-14 [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting) ISSN (Online): 2337